

**ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR
DAERAH OTONOMI BARU**

MUHAMMAD APRILIANSYAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas analisis revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan Implikasinya Terhadap Kehadiran Orang Asli Papua dalam Mengatur Daerah Otonomi Baru. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 secara tidak langsung menghilangkan kewenangan lembaga legislatif Papua yaitu DPRP dan MRP dalam hal memekarkan wilayah Papua dan Pemerintah Pusat memiliki wewenang penuh untuk memekarkan wilayah Papua tanpa menunggu persetujuan MRP dan DPRP, sehingga secara tidak langsung hal tersebut sudah melemahkan atau bahkan menghilangkan hak politik Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis naratif dan diskursus dengan menggunakan data primer serta sekunder diantaranya berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis juga menggunakan empat tahapan analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat usaha sentralisasi dari Pemerintah Pusat dalam menekan gerakan separatisme di Papua dengan cara penambahan aparat keamanan yang sejalan dengan pemekaran Provinsi di Papua. Pemerintah Pusat menilai kinerja MRP selama berjalannya Otonomi Khusus Papua dari tahun 2001 hingga 2021 belum secara maksimal, dan perlu adanya campur tangan Pemerintah Pusat agar pembangunan yang terjadi di Papua berjalan dengan lancar. Proses penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 sendiri tidak melibatkan partisipasi MRP dan DPRP selaku lembaga legislatif dan represntatif kultural OAP yang diakui negara, yang menyebabkan hilangnya makna politik kehadiran yang menjadi tujuan awal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Analisis kebijakan kritis yang penulis lakukan terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua menilai bahwa Pemerintah Pusat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan dan Orang Asli Papua diabaikan karena tidak memiliki kesempatan dalam penyusunan kebijakan untuk wilayahnya sendiri.

Kata kunci: otonomi khusus papua, politik kehadiran, analisis kebijakan kritis, hilangnya kewenangan lembaga legislatif

**ANALYSIS OF THE REVISION OF LAW NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING
PAPUA'S SPECIAL AUTONOMY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE PRESENCE
OF ORIGINAL PAPUAN PEOPLE IN ADMINISTERING THE NEW AUTONOMOUS
AREA**

MUHAMMAD APRILIANSYAH

ABSTRACT

This study aims to discuss the analysis of the revision of Law Number 2 of 2021 concerning the Special Autonomy of Papua and its Implications for the Presence of Indigenous Papuans in Regulating the New Autonomous Region. Amendment to Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua, in particular article 76, indirectly eliminates the authority of the Papuan legislative bodies, namely the DPRD and DPRD in terms of dividing the Papua region and the Central Government has full authority to divide the Papua region without waiting for the approval of the DPRD and DPRD, so indirectly this has weakened or even eliminated the political rights of Indigenous Papuans in governing the new autonomous region.

The method used in this research is descriptive qualitative with narrative and discourse analysis using primary and secondary data including interviews, documentation, and literature study. The author also uses four stages of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results obtained from this study indicate that there has been a centralization effort from the Central Government in suppressing separatist movements in Papua by adding security personnel which is in line with the division of the Province in Papua. The Central Government considers that the performance of the DPRD during the implementation of the Special Autonomy for Papua from 2001 to 2021 has not been maximized, and that there is a need for Central Government intervention so that the development that is taking place in Papua runs smoothly. The process of drafting changes to Law Number 2 of 2021 itself does not involve the participation of the DPRD and DPRD as legislative and cultural representative institutions of the OAP that are recognized by the state, which causes the loss of the political meaning of presence which was the initial goal in Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The critical policy analysis that the author conducted on the policy of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua considers that the Central Government uses its power to benefit and Indigenous Papuans are ignored because they do not have the opportunity to formulate policies for their own territory.

Keywords: *Papua Special Autonomy, Presence Politics, Critical Policy Analysis, Loss of Legislative Authority*